

TESIS

**PENGAWASAN TERHADAP PENCEMARAN UDARA AKIBAT
LIMBAH ASAP PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)
OMBILIN OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA
SAWAHLUNTO**

Oleh:
PUJA RAHAYU TRININGSIH

2120112033

**Program Kekhususan: Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi
Negara**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

DRART TESIS

PENGAWASAN TERHADAP PENANGGULANGAN PENCEMARAN UDARA AKIBAT LIMBAH ASAP PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) OMBILIN OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

(Puja rahayu triningsih, 2120112033, Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas)

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pengawasan terhadap penanggulangan termasuk ke dalam pengendalian pencemaran udara yang diatur dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 41 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu Pasal 44, 45, dan Pasal 46 yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap pengendalian pencemaran udara dilaksanakan oleh Menteri yang kemudian dapat menetapkan pejabat yang berwenang dalam melakukan pengawasan. Permasalahan ini terjadi di Kota Sawahlunto tepatnya di Desa Sijantang pencemaran udara terjadi akibat kebocoran filter cerobong asap dari PLTU Ombilin. Atas dasar itu penelitian ini dilakukan untuk mengemukakan permasalahan Pertama bagaimana pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Sawahlunto terhadap pengendalian pencemaran udara tersebut. Kedua apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Sawahlunto dalam melakukan pengawasan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris dengan meneliti bahan kepustakaan terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan wawancara. Kemudian, data yang didapat dianalisis secara kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian bahwa pengawasan telah dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto yaitu berupa pengawasan langsung dan tidak langsung secara rutin, kemudian juga melakukan pembinaan terhadap PLTU Ombilin. Pengawasan langsung dilakukan secara periodik dan dadakan, sementara pengawasan tidak langsung merupakan pelaporan dokumen oleh PLTU Ombilin kepada Dinas terkait. Kendala yang dihadapi yaitu kewenangan yang tidak sepenuhnya ada di pemerintah kota, kemudian kurangnya personil pengawas dan kurangnya kesadaran hukum dari pihak PLTU, serta masyarakat yang kurang memahami dan menyadari langkah hukum yang harus ditempuh.

Kata Kunci : Pengawasan Penanggulangan, Pencemaran Udara

DRART TESIS
UNITED NATIONS CONDITIONS WILL GET A COVER COATING AIR
CUMBER LIMITES ENERGY VAPE ELECTRICAL GENERATORS (PLTU)
OMBILIN OLEH GOVERNMENT OF SAAHLUNTO

(Puja rahayu triningsih,2120112033, Master of law, Faculty of Law Andalas University)

ABSTRACT

Article 28 H Paragraph 1 of the Basic Law of the Republic of Indonesia of 1945 states that everyone has the right to a healthy and healthy living environment and to health care. Monitoring of non-compliance is included in the control of air pollution regulated by the Republic of Indonesia Regulation No. 41 on Air Pollution Control namely Articles 44, 45 and 46. The air pollution was caused by a smoke filter leak from Ombilin's PLTU. On that basis, this research is being carried out to raise the first question about how the Sawahlunto City government monitors air pollution control. Both of these are obstacles faced by the Sawahlunto City government in carrying out the surveillance. Based on this problem, the research is carried out using empirical juridic methods by examining library materials first, then continuing with interviews. Then, the data obtained was analyzed qualitative scara with characteristics of analytical descriptive research. From the results of the research that the surveillance that has been carried out by the Housing, Residential Areas and Environment of the City of Sawahlunto is direct and indirect surveillances on a routine basis, then also the construction of PLTU Ombilin. The obstacles faced are the lack of full authority in the city government, then lack of supervisory power and lack of legal awareness of the PLTU party, as well as the people who have not understood and aware of the legal steps to be taken.

Keywords: surveillance, air pollution